

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN TA 2023

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perindustrian
Unit Eselon I/II	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Besar Keramik
Program	:	019.WA Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	1. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien 2. Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri 3. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri 4. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Indikator Kinerja Program	:	1. Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian 2. Efektifitas regulasi industry 3. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 4. Jumlah produk tersertifikasi TKDN minimal 25% yang masih berlaku 5. Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan eksternal 6. Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian 7. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal 8. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti 9. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti 10. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) 11. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan 12. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
Kegiatan	:	6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 2. Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi 3. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 4. Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai disiplin pegawai 3. Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar

Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP)

4. Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu
5. Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8
6. Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A
7. Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90
8. Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa
9. Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan publik

Klasifikasi Rincian Output	: 6042.EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal
Indikator KRO	: Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal
Rincian Output	: Layanan Manajemen Keuangan
Indikator RO	: Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel
Volume RO	: 1 (satu)
Satuan RO	: Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- 1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 4) PMK Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- 5) PMK Nomor 270 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat
- 6) PMK Nomor 222 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (penyusunan LKKL) Perubahan PMK-177/PMK.05/2015 – Format CaLK 2016

2. Gambaran Umum

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang dirancang dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Negara untuk kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban sekaligus. Tujuannya adalah agar pelaporan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

akuntansi sehingga dapat memberikan nilai manfaat dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

Sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah sumber dokumen dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem tersebut diimplementasikan pada satuan kerja dengan menggunakan Aplikasi SAIBA. Tujuan dari sistem akuntansi ini adalah untuk keperluan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada BSKJI dan harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu dengan KPPN.

Pelaksanaan kegiatan implementasi pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sangat penting bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keuangan dan aset negara untuk turut mewujudkan good and clean governance.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini secara langsung adalah pegawai Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam dan secara tidak langsung adalah masyarakat umum pengguna jasa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Implementasi SIMAK-BMN dan SAI dimulai dengan adanya mutasi penambahan barang melalui transaksi pembelian barang melalui APBN, hibah peralatan/barang, transfer masuk dan lain-lain serta mutasi pengurangan barang mulai proses penghapusan dan lain-lain. Input data dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sah yaitu SP2D, Kuitansi, Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Serah Terima Transfer/Hibah dan lainnya. Melakukan rekonsiliasi internal dengan laporan keuangan serta melakukan stock opname barang untuk mencocokkan jumlah fisik di lapangan dan di buku inventaris.

Implementasi SAI dimulai dengan adanya input data dari realisasi penerimaan maupun pengeluaran anggaran yang bersumber dari SSBP, SPM dan SP2D diterbitkan oleh KPPN. Setiap akhir bulan dilakukan input data persediaan. Mengadakan rekonsiliasi dengan KPPN, serta membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan layanan penyelenggaraan kearsipan adalah :

- Input data penerimaan, pengeluaran
- Input data mutasi aset tetap
- Input data persediaan, sumber data laporan persediaan dari pengelola gudang
- Input data piutang, Pendapatan diterima di muka, Penerimaan yang masih harus diterima, sumber data laporan piutang dari bendahara penerimaan
- Olah data hasil input
- Rekonsiliasi dengan KPPN
- Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan

3. Waktu Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Bulan Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Input data penerimaan dan pengeluaran												
2	Input data mutasi aset tetap												
3	Input data persediaan												
4	Input data piutang, PDM, PYMHD												
5	Olah data hasil input												
6	Rekonsiliasi KPPN												
7	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan tahunan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan implementasi pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, mulai Januari sampai dengan Desember 2023.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 75.740.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB). Semua biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA Balai Besar Keramik Tahun Anggaran 2023.

Bandung, 06 September 2022

Al Kepala Balai Besar Standardisasi dan pelayanan JasaAl
Industri Keramik dan Mineral Nonlogam



Ir. Azhar Fitri, M.Si.
NIP. 196602061993031002